



MENDORONG KEBIJAKAN
BERBASIS PENGETAHUAN

ANNUAL • REPORT 2023



**MENDORONG KEBIJAKAN
BERBASIS PENGETAHUAN**

ANNUAL REPORT 2023

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Pendahuluan	ii
Laporan Keuangan	iv
Program dan Hasil yang Dicapai	1
LRC dalam Gambar	16

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga Lombok Research Center (LRC) dapat kembali menyelesaikan Laporan Tahunan 2023.

Tahun 2023 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi Lombok Research Center (LRC). Namun, berkat kerja keras, kerjasama dan dedikasi seluruh staf Lombok Research Center (LRC), kami berhasil mencapai beberapa capaian yang patut disyukuri. Salah satu capaian utama LRC di tahun 2023 adalah berhasil menyelesaikan seluruh kegiatan yang telah diagendakan dalam implementasi Program INKLUSI di Kabupaten Lombok Timur. Selain itu, beberapa produk pengetahuan berhasil diselesaikan serta terpublikasikan di berbagai media publikasi yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mengambil kebijakan.

Selain itu, LRC juga berhasil memperkuat kemitraan dengan berbagai pihak, baik di tingkat lokal, maupun nasional. Kemitraan ini telah membuka peluang bagi LRC untuk mengembangkan kerja-kerja penelitian dan pemberdayaan masyarakatnya. Meskipun telah mencapai beberapa capaian, LRC tetap menyadari bahwa masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dana maupun SDM. Tantangan lainnya adalah semakin kompleksnya isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat Nusa Tenggara Barat.

Meskipun demikian, LRC bertekad untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Nusa Tenggara Barat. Laporan Tahunan 2023 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak eksternal, sekaligus sebagai refleksi untuk terus menyempurnakan upaya ke depan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung LRC selama tahun 2023. Semoga kerja sama ini dapat terus terjalin di tahun-tahun mendatang.

Lombok Timur, 20 Januari 2024
Direktur Lombok Research Center

PENDAHULUAN



Dalam usia yang telah mencapai 14 tahun, Lombok Research Center (LRC) tidak hanya diharapkan mampu untuk menjalankan visi dan misi ketika lembaga ini didirikan, namun juga harus mampu hadir sebagai institusi dengan tata kelola yang semakin baik dan matang. Melalui perencanaan strategis tahun 2022-2027, kami tidak hanya melihat relevansi LRC terhadap berbagai situasi isu pembangunan yang terjadi, namun juga mengukur kapasitas lembaga untuk dapat terus berjalan dan berkembang dengan model kelembagaan yang kami rencanakan.

Lombok Research Center (LRC) merupakan lembaga non profit yang fokus pada upaya-upaya berbagi pengetahuan dimana, salah satu kegiatan utamanya adalah melakukan berbagai riset-riset terapan dan proses pemberdayaan masyarakat. Di dalam melakukan riset-riset dan pemberdayaan masyarakat, Lombok Research Center (LRC) fokus pada isu-isu pembangunan yang bertujuan dimana, dari produk-produk kegiatan yang dilakukan dapat berkontribusi bagi pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan untuk pembangunan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari masyarakat sipil dan mitra pembangunan bagi pemerintah, LRC terus berupaya memetakan arah dan kapasitas lembaga. Melalui implementasi Program INKLUSI yang sedang kami jalankan, kami terus membangun hubungan dengan berbagai mitra kerja yang memiliki kesamaan dan kesepahaman.

Melalui berbagai pendekatan dan kegiatan tersebut, Lombok Research Center (LRC) telah berkontribusi dalam beberapa hal seperti, berbagai regulasi kebijakan dalam upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif di daerah. Selain itu, meningkatnya keberpihakan pemerintah desa dalam mendorong upaya pemenuhan hak-hak kelompok masyarakat rentan dan/atau marjinal dalam berbagai bentuk layanan pemerintah. Pada tahun 2023 juga menjadi dasar capaian lembaga sebagai mitra pembangunan dimana, Lombok Research Center (LRC) ikut terlibat secara aktif dalam berbagai proses perencanaan pembangunan daerah.

Sebagai lembaga yang mendorong akuntabilitas yang berorientasi pada keberlanjutan dan perencanaan maka, sangat perlu bagi kami untuk memperoleh masukan dan kritikan dengan harapan hal tersebut dapat menjadi bahan proses belajar serta evaluasi bagi pelaksanaan program dan perencanaan lembaga di masa yang akan datang.

Laporan **Pengelolaan** **Keuangan** LRC Tahun 2023

No.	Deskripsi	Total Dana
1	Program INKLUSI	1.056.628.699
2	Bansos Anggota DPR RI	50.000.000
3	Bansos (Bulan Ramadhan)	20.000.000
4	Pelatihan Penguatan Kapasitas Lembaga	50.000.000
5	Pelatihan Mediator	45.000.000
6	Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak dan Perundungan di Sekolah	40.000.000
Total		1.261.628.699



PROGRAM DAN HASIL YANG DICAPAI

1 Program INKLUSI

Program ini merupakan dukungan Pemerintah Australia kepada Pemerintah Indonesia dalam upaya mendorong tujuan pembangunan yang lebih luas, yaitu tidak ada satupun yang tertinggal dalam pembangunan, lebih banyak kelompok marginal berpartisipasi dan mendapat manfaat dari pembangunan di bidang sosial budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia.

Lombok Research Center (LRC) menjadi mitra Yayasan BaKTI dalam implementasi Program INKLUSI di kabupaten Lombok Timur. Untuk dapat memastikan efisiensi dan keberlanjutan program, Lombok Research Center (LRC) membangun kemitraan dengan 4 (empat) stakeholder kunci, yaitu pemerintah daerah, DPRD, masyarakat melalui Kelompok Konstituen (KK), dan jurnalis melalui pembentukan Forum Media Lombok Timur Inklusif.



Mendorong **Regulasi Kebijakan** Yang **Inklusif**

Perda Lombok Timur tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Perempuan, dan Anak

Sepanjang tahun 2023, banyak kegiatan yang dilakukan oleh LRC yang melibatkan 4 (empat) stakeholder kunci dalam implementasi Program INKLUSI di Kabupaten Lombok Timur, terutama dalam mendorong kebijakan yang inklusif. Salah satu upaya mendorong kebijakan yang inklusif tersebut adalah berupa regulasi yang akan menjadi payung hukum dalam upaya memastikan penjangkauan dan pemenuhan hak kelompok masyarakat rentan dan marjinal.

Lombok Research Center (LRC) memfasilitasi DPRD dalam kegiatan konsultasi publik Ranperda tentang Penghormatan, Pelindungan, dan

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Perempuan, dan Anak. Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan mekanisme bagi keterlibatan masyarakat dalam setiap proses kebijakan pembangunan. Dimana, dengan adanya kegiatan konsultasi publik memberikan ruang dan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat memberikan masukan, pendapat, pandangan, ide, dan saran yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat.

Output Kegiatan

1. Terlibatnya masyarakat secara aktif dalam penyusunan peraturan daerah;
2. Tersedianya peraturan daerah yang telah disempurnakan berdasarkan saran dan masukan peserta

Peraturan Desa tentang Perlindungan Sosial Bagi Masyarakat Rentan

Selain mendorong regulasi kebijakan di tingkat daerah, pada tahun 2023 Lombok Research Center (LRC) dalam rangkaian implementasi Program INKLUSI juga memfasilitasi 3 dari 15 desa dampingan untuk menyusun regulasi di tingkat lokal dalam bentuk peraturan desa. Adapun desa-desa dampingan tersebut adalah Desa Paokmotong dan Desa Masbagik Utara Baru yang ada di Kecamatan Masbagik serta Desa Aikmel Utara yang ada di Kecamatan Aikmel.

Isu inklusi sosial perlu dimasukkan dalam perencanaan pembangunan desa. Hal ini penting karena masih banyak kelompok rentan di desa yang belum mendapatkan akses yang memadai terhadap pembangunan. Kebijakan desa yang mendukung inklusi sosial perlu dibuat untuk memperkuat komitmen desa dalam

mewujudkan desa yang inklusif. Kebijakan ini juga dapat memperkuat keberadaan Kelompok Konstituen (KK) yang telah terbentuk di desa-desa dampingan.

Kebijakan perlindungan sosial (Perlinsos) menjadi hal penting untuk mendorong pemerataan hak jaminan kesehatan, menjaga tingkat kesejahteraan, dan meminimalisasi persoalan di masyarakat. Perlinsos menjadi elemen penting dalam strategi kebijakan publik untuk memerangi kemiskinan. Pemerintah pusat dan daerah perlu menyelaraskan upayanya dalam mewujudkan perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Desa juga perlu memiliki peraturan tentang pelaksanaan dan mekanisme perlindungan bagi masyarakat rentan.

Output Kegiatan

1. Tersusunnya naskah legal drafting peraturan desa;
2. Tersosialisasinya draf peraturan desa

Penyusunan SOP Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak di UPTD PPA Kabupaten Lombok Timur

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu permasalahan yang serius di Indonesia. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menunjukkan bahwa pada tahun 2022, terdapat 19.146 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 13.382 kasus adalah kekerasan terhadap perempuan dan 5.764 kasus adalah kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap perempuan dan anak memiliki dampak yang luas, baik bagi korban, keluarga, maupun masyarakat secara keseluruhan. Dampak tersebut dapat berupa dampak fisik, psikis, sosial, dan ekonomi.

Kabupaten Lombok Timur yang menjadi tempat implementasi Program INKLUSI menjadi salah satu daerah dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tertinggi di Provinsi NTB. Berdasarkan data SIMFONI PPA, angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melonjak sangat tinggi dalam periode 2019-2023. Pada 2019 angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan

anak di daerah ini sebanyak 13 kasus namun, kasus tersebut terus mengalami peningkatan sampai dengan 2023. Dimana data terakhir menyebutkan terjadi 206 kasus atau mencapai 21 persen dari 976 total kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di NTB.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk menyediakan layanan bagi korban kekerasan untuk mendapatkan akses yang mudah dan cepat ke layanan yang mereka butuhkan. Sehingga dalam upaya mendukung hal tersebut maka, Lombok Research Center (LRC) juga telah melaksanakan kegiatan assessment terhadap UPTD PPA yang memiliki keterkaitan untuk memberikan layanan perlindungan bagi korban kekerasan di Lombok Timur.

Berdasarkan hasil Assessment tersebut, UPTD PPA saat ini telah memiliki SOP internal saja. Namun demikian, SOP tersebut sejauh ini belum dapat diterapkan secara maksimal karena terdapat beberapa hal yang belum terakomodir dalam SOP tersebut. Hal penting yang belum

terakomodir adalah terkait dengan mekanisme pelayanan, mekanisme koordinasi dan rujukan, sistem pendataan dan jejaring. Mengingat bahwa UPTD PPA merupakan unit

layanan yang sistem kerjanya koordinasi dan jejaring maka dirasa penting untuk melakukan perubahan atas SOP Layanan di UPTD PPA Kabupaten Lombok Timur.

Output Kegiatan

1. Meningkatnya pemahaman pelaksana pada UPTD PPA tentang layanan korban kekerasan yang inklusif;
2. Menyediakan dokumen yang menjadi panduan dalam pelayanan UPTD PPA;
3. Tersusunnya SOP Inklusif pada UPTD PPA Kabupaten Lombok Timur.

Penyusunan Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan adalah salah satu hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara. Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik, mental, sosial, dan ekonomi mereka. Oleh karena itu, perlu adanya peraturan kepala daerah yang memperkuat tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di tingkat kabupaten.

Untuk itu, sebagai upaya memperkuat keberadaan SOP

Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak di UPTD PPA Kabupaten Lombok Timur yang telah dibuat maka, komitmen Lombok Research Center (LRC) dalam mendukung implementasi kebijakan yang inklusif terwujudkan dalam penyusunan peraturan bupati Lombok Timur.

Pembuatan peraturan kepala daerah ini penting untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di daerah. Selain itu, pembuatan peraturan kepala daerah ini juga penting untuk



menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal, serta mengakomodasi aspirasi dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, peraturan kepala daerah ini dapat meningkatkan kesadaran, komitmen, dan koordinasi semua pihak dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Output Kegiatan

1. Tersedianya draf peraturan bupati yang difinalisasi;
2. Tersedianya draf peraturan bupati untuk dilanjutkan ke tahap harmonisasi.

Aksi Kolektif Peringatan Hari Perempuan Sedunia

Peringatan Hari Perempuan Sedunia 2023 yang jatuh pada tanggal 8 Maret 2023 mengusung tema *Embrace Equity* atau merangkul kesetaraan. Tema ini dipilih untuk mengingatkan kita semua akan pentingnya kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan. Kesetaraan gender adalah kondisi di mana perempuan dan laki-laki memiliki hak, kesempatan, dan tanggung jawab yang sama. Kesetaraan gender penting untuk diperjuangkan karena merupakan hak asasi manusia yang fundamental.

Di Indonesia, kesetaraan gender masih menjadi tantangan yang belum sepenuhnya tercapai. Masih banyak perempuan yang mengalami

diskriminasi dan kekerasan. Masih banyak pula perempuan yang tidak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya.

Untuk mencapai kesetaraan gender, diperlukan upaya dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun individu. Pemerintah perlu membuat kebijakan yang mendukung kesetaraan gender. Masyarakat perlu mengubah pola pikir dan perilaku yang diskriminatif terhadap perempuan. Individu perlu memiliki kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dan turut berperan aktif dalam mewujudkannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam kegiatan yang dilakukan

Lombok Research Center (LRC) pada 2023 juga telah melaksanakan peringatan Hari Perempuan Sedunia dalam bentuk aksi kolektif yang melibatkan berbagai stakeholder dengan tema yang menyesuaikan konteks daerah. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya mencapai tujuan program yaitu, terwujudnya pembangunan yang inklusif di daerah maka memang perlu dilakukan

berbagai upaya, tidak hanya melalui sisi tata pemerintahan dan pemberdayaan saja melainkan juga melalui penyebaran pengetahuan. Sehingga pemahaman tentang makna kepemimpinan masih relatif rendah masih terbatas pada ketika menempati posisi struktural saja dapat ditingkatkan melalui aksi kolektif yang dilaksanakan oleh Lombok Research Center (LRC).

Output Kegiatan

1. Tersebarnya pengetahuan tentang peran perempuan dalam pembangunan;
2. Berkembangnya pola pikir masyarakat terkait dengan kepemimpinan dalam berbagai sektor.

Aksi Kolektif Peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Serta Hari Disabilitas Internasional

Di penghujung tahun 2023, Lombok Research Center (LRC) melaksanakan kegiatan Kampanye Peringatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang dimulai dari 25 November hingga 10 Desember setiap tahunnya. Peringatan ini menjadi momentum penting dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya upaya bersama dalam

menghapus dan mencegah kekerasan terhadap perempuan. Kegiatan aksi kolektif ini juga menjadi media penyebarluasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU ini mengatur mengenai Pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Hak Korban; koordinasi

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan kerja sama internasional agar Pencegahan dan Penanganan Korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan efektif. Selain itu, diatur juga keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemulihan Korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual.

Dalam momen peringatan kampanye 16HAKTP tahun 2023, Lombok Research Center (LRC) juga merangkaikannya dengan peringatan Hari Disabilitas Internasional dimana, hal ini juga untuk mengingatkan semua pihak tentang pentingnya kesetaraan dan keadilan bagi penyandang disabilitas.

Pada aksi kolektif tahun 2023 ini, kami mengambil tema yang terkait dengan sosialisasi Undang Undang

Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau biasa disebut dengan UU TPKS. Sedangkan untuk tema peringatan Hari Disabilitas Internasional mengusung tema global, yaitu "United in action to rescue and achieve the SDGs for, with and by persons with disabilities". Tema ini penting untuk mengingatkan masyarakat bahwa penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan, selain itu juga mendorong masyarakat yang memiliki keluarga dengan disabilitas untuk dapat memberikan kesempatan dan ruang bagi mereka untuk berkembang sesuai dengan potensi yang mereka miliki.

Output Kegiatan

1. Tersebarluasnya UU TPKS sebagai payung hukum bagi korban kekerasan seksual;
2. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terkait dengan pentingnya perencanaan keluarga, terutama bagi pasangan muda;
3. Meningkatnya pemahaman masyarakat bahwa penyandang disabilitas juga berhak berpartisipasi dalam pembangunan;
4. Terbangunnya pola pikir terkait keberdayaan disabilitas melalui figure inspirasi.

2 Pelatihan Mediator

Ada berbagai macam bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, mulai dari kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis, hingga kekerasan ekonomi. Kekerasan ini dapat menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi korban, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Salah satu upaya untuk menyelesaikan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah melalui mediasi. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan bantuan mediator. Mediator adalah orang yang netral dan berpengalaman yang bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan.

Mediasi memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan penyelesaian kasus kekerasan melalui jalur hukum. Pertama, mediasi dapat memberikan solusi yang lebih cepat dan tepat bagi para pihak. Kedua, mediasi dapat menjaga hubungan baik antara para pihak, sehingga dapat mencegah terjadinya kekerasan di masa depan. Ketiga, mediasi dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban, karena korban dapat terlibat langsung dalam proses penyelesaian kasusnya. Atas dasar hal tersebut maka, dibutuhkan peran seorang mediator yang bertindak sebagai fasilitator yang membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Sehingga pada

tahun 2023, Lombok Research Center (LRC) juga melaksanakan pelatihan bagi masyarakat yang ingin menjadi mediator, terutama dalam memediasi kasus kekerasan yang terjadi di desa. Pelatihan mediator kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat penting untuk dilakukan karena beberapa alasan, antara lain adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan calon mediator dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mediator perlu memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum, hak asasi manusia, dan isu-isu gender. Selain itu, mediator juga perlu memiliki keterampilan komunikasi yang efektif, empati, dan negosiasi.

Pengetahuan tentang hukum, hak asasi manusia, dan isu-isu gender penting bagi mediator untuk memahami hak-hak korban kekerasan, termasuk hak atas perlindungan, hak atas keadilan, dan hak atas pemulihan. Keterampilan komunikasi yang efektif diperlukan mediator untuk membangun hubungan yang baik dengan para pihak yang bersengketa. Empati diperlukan mediator untuk memahami sudut pandang para pihak yang bersengketa. Negosiasi diperlukan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Output Kegiatan

1. Meningkatnya kemampuan masyarakat desa dalam menyelesaikan sengketa secara damai;
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat desa terhadap proses penyelesaian sengketa;
3. Peningkatan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa.

3 Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak dan Perundungan di Sekolah

Kasus perkawinan anak serta perundungan masih menjadi salah satu permasalahan sosial yang menjadi tantangan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Dampak negatif yang ditimbulkan dari kasus perkawinan anak dan perundungan tidak saja dirasakan secara fisik namun, juga berdampak negatif terhadap psikologis anak yang akan mempengaruhi kehidupan anak.

Oleh karena itu, kasus perkawinan anak dan perundungan penting untuk menjadi perhatian semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun orang tua. Semua pihak harus bekerja sama untuk mencegah terjadinya kasus perkawinan anak dan perundungan, serta melindungi anak-anak dari dampak negatifnya.

Sosialisasi pencegahan perkawinan anak dan perundungan di sekolah merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Lombok Research Center (LRC) pada 2023 untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan siswa tentang kedua permasalahan tersebut. Didalam kegiatan tersebut, Lombok Research Center (LRC) memberikan pemahaman kepada para siswa mengenai perkawinan anak serta dampak negatif yang dirasakan, serta upaya-upaya penting untuk dilakukan sebagai tindakan pencegahan.

Kegiatan ini juga dapat melibatkan siswa dan guru untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perkawinan anak. Selain itu terkait dengan materi perundungan mencakup pengertian perundungan, jenis-jenis perundungan, dampak tindakan perundungan, dan cara-cara pencegahan terjadinya perundungan.

Output Kegiatan

1. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman siswa tentang dampak perkawinan anak dan perundungan di sekolah;
2. Meningkatnya kesadaran siswa tentang permasalahan perkawinan anak serta perundungan di sekolah.

4 Sosialisasi dan Launching Aplikasi Buat Administrasi Kependudukan Secara Online (BAKSO)

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan pada tanggal 26 November 2013 merupakan perubahan yang mendasar di bidang administrasi kependudukan.

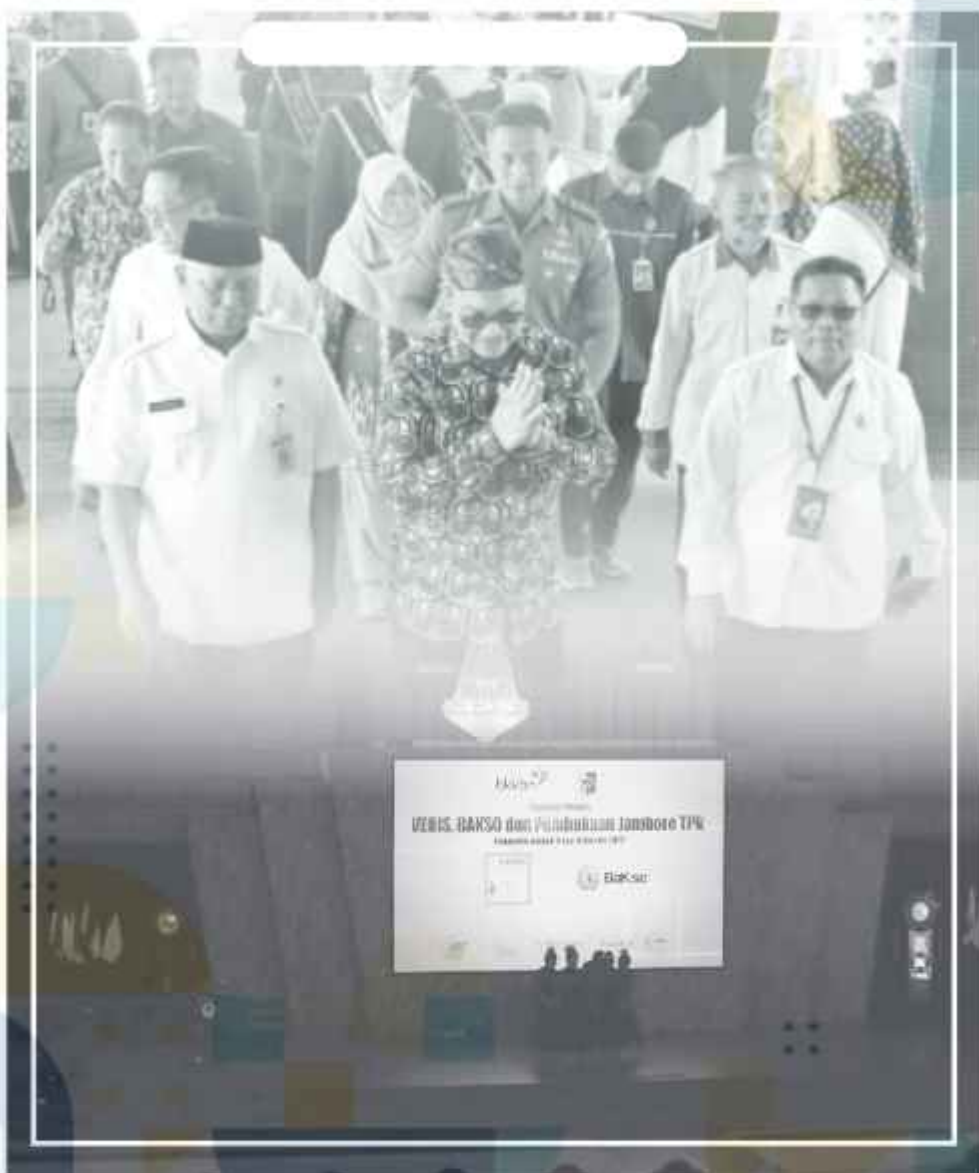
Atas dasar hal itu maka, pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat sesuai dengan tujuan dari perubahan kebijakan yang dimaksud. Pemilikan dokumen kependudukan merupakan hak setiap penduduk, termasuk kelompok masyarakat rentan. Kelompok masyarakat rentan adalah kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam mengakses dokumen kependudukan, baik karena faktor ekonomi, sosial, maupun geografis. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus meningkatkan akses kelompok masyarakat rentan terhadap administrasi kependudukan.

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terus berupaya

melakukan berbagai inovasi terkait dengan mendekatkan fungsi pelayanannya untuk pembuatan adminduk. Salah satu inovasi tersebut adalah Buat Administrasi Kependudukan Secara Online (BAKSO). Aplikasi ini dapat memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukannya, mempercepat proses pengurusan administrasi kependudukan, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan administrasi kependudukan.

Terkait dengan hal tersebut, Lombok Research Center (LRC) mendukung upaya pemda Lombok Timur dalam mendekatkan fungsi pelayanannya. Untuk itu, pada 9 Agustus 2023, LRC terlibat aktif dalam kegiatan Sosialisasi dan Launching Aplikasi Buat Administrasi Kependudukan Secara Online (BAKSO) yang dilaksanakan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), Lenek, Lombok Timur.





Output Kegiatan

1. Memudahkan masyarakat dalam mengurus adminduk;
2. Mempercepat proses pengurusan adminduk;
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan adminduk.

5 Musrenbang RKPD Lombok Timur Tahun 2024

Musrenbang RKPD (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah) merupakan forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPD. Musrenbang RKPD melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, tokoh masyarakat, dan perwakilan dari masyarakat.

Sebagai mitra pembangunan, Lombok Research Center (LRC) terus melakukan kerja-kerja kolaboratif dengan pemerintah daerah. Sehingga dalam kegiatan Musrenbang RKPD 2024 Kabupaten Lombok Timur mendapatkan apresiasi untuk dapat terlibat di kegiatan tahunan tersebut.

Keterlibatan LRC ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa RKPD Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Untuk itu, aspirasi dan

masukan dari masyarakat harus dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan RKPD. Dengan demikian, RKPD dapat menjadi pedoman bagi pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Output Kegiatan

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
2. Menjamin kesesuaian RKPD dengan kebutuhan dan potensi daerah;
3. Menjamin keterbukaan dan transparansi dalam perencanaan pembangunan.

6 Sosialisasi Keamanan Digital

Keamanan digital adalah perlindungan sistem digital, seperti komputer dan jaringan, dari penyadapan informasi, pencurian, atau kerusakan pada perangkat keras, perangkat lunak, atau data elektronik pengguna, serta dari gangguan atau penyesatan layanan yang diberikan. Keamanan digital juga dapat disebut sebagai keamanan siber (cyber security) atau keamanan komputer (computer security).

Hampir seluruh komponen kehidupan yang ada di era sekarang, mulai dari individu, bisnis, hingga pemerintahan, sangat membutuhkan keamanan digital yang mumpuni. Sudah ada banyak bisnis yang memfokuskan dirinya di dunia digital, yang membuat orang-orang yang bekerja di dalamnya juga akan sering berkegiatan di dunia digital. Pemerintah juga telah memanfaatkan

sistem digital karena lebih baik dan lebih murah.

Maraknya digitalisasi yang terjadi di sekitar kita jelas membuat banyak penjahat digital yang mulai muncul untuk mengancam keamanannya. Oleh karena itu, keamanan digital adalah hal yang harus diperhatikan agar kita dapat mencegah atau terhindar dari kejahatan digital.

Untuk itu, penting untuk mensosialisasikan terkait dengan keamanan digital kepada masyarakat sebagai upaya antisipasi perkembangan kejahatan berbasis online. Lombok Research Center (LRC) sepanjang tahun 2023 telah melakukan berbagai kegiatan yang terkait dengan hal tersebut. Sosialisasi keamanan digital yang dilakukan oleh LRC menyasar 15 desa yang selama ini menjadi desa dampingan.

Output Kegiatan

1. Masyarakat menjadi lebih sadar terhadap ancaman kejahatan digital;
2. Masyarakat memahami teknis keamanan digital;
3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terkait informasi baru keamanan digital;
4. Perubahan perilaku masyarakat dalam bermedia sosial

LRC dalam Gambar

Peristiwa Penting



Januari

Lombok Research Center (LRC) melakukan pertemuan dengan unsur pimpinan DPRD Lombok Timur dan pimpinan alat kelengkapan dewan terkait dengan identifikasi masalah dan kebutuhan dalam upaya penyusunan Raperda tentang Kabupaten Inklusif.

Februari

Pertemuan penguatan kelompok konstituen untuk penerimaan pengaduan dan penyediaan layanan komunitas dan advokasi kebijakan di Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan ini dilakukan di 15 desa yang menjadi wilayah dampingan Lombok Research Center (LRC) dalam implementasi Program INKLUSI.



Maret



- Lombok Research Center (LRC) mengadakan acara Peringatan Hari Perempuan Sedunia yang dilaksanakan setiap tanggal 8 Maret. Kegiatan dalam bentuk talk show dengan tema "Kepemimpinan Perempuan dalam Pembangunan yang Inklusif".
- Lombok Research Center (LRC) memfasilitasi penyusunan peraturan desa tentang perlindungan sosial bagi masyarakat rentan di 3 (tiga) desa dampingan Program INKLUSI sebagai percontohan pembuatan kebijakan yang inklusif di Kabupaten Lombok Timur.
- Lombok Research Center (LRC) memfasilitasi penyusunan SOP pelayanan pada UPTD PPA Lombok Timur.

April - Mei

Uji publik Rancangan Peraturan Daerah Lombok Timur Kabupaten Inklusif yang dilaksanakan tiga kali selama periode April-Mei



Juni



Focus Group Discussion (FGD) bersama anggota legislatif Kabupaten Lombok Timur yang berasal dari daerah pemilihan wilayah dampingan Lombok Research Center (LRC) pada Program INKLUSI.



Penguatan Kelompok Konstituen (KK) dalam perlindungan anak di Kabupaten Lombok Timur

Juli

Finalisasi Peraturan Desa tentang Perlindungan Sosial Bagi Masyarakat Rentan di Desa Aikmel Utara dan Desa Masbagik Utara Baru



Agustus



Lombok Research Center (LRC) terlibat dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Lombok Timur melalui kegiatan Musrenbang RKPD 2024 Kabupaten Lombok Timur



Lombok Research Center (LRC) berkolaborasi dengan pemda Lombok Timur dalam kegiatan launching Aplikasi BAKSO (Buat administrasi Kependudukan Secara Online)

September

Pelatihan mediasi di 15 desa dampingan
Lombok Research Center



Sosialisasi pencegahan perkawinan
anak dan perundungan di sekolah



Oktober



Lombok Research Center (LRC) memfasilitasi penyusunan Peraturan Bupati Lombok Timur tentang SOP Layanan UPTD PPA

Nopember - Desember



Monitoring dan Evaluasi Program
INKLUSI BaKTI terhadap Lombok
Research Center (LRC)

Peringatan 16 Hari Anti
Kekerasan terhadap Perempuan
(HAKTP) tahun 2023



Peningkatan kapasitas jurnalis dalam
penulisan berita yang inklusif



Mentoring dan TA Pemda
Lombok Timur bersama
dengan DPRD Lombok Timur





**MENDORONG KEBIJAKAN
BERBASIS PENGETAHUAN**